

PERSPEKTIF ANALISIS INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER KOTA TANJUNGPINANG DALAM MASA PANDEMI COVID-19

Fitri Kurnianingsih^{1*}, Mahadiansar¹, Rizqi Apriani Putri¹, Okky Rizki Azizi¹

¹Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

*e-mail: fitrikurnianingsih@umrah.ac.id

Abstrak

Pemberdayaan gender merupakan sebuah rekonstruksi dalam kesetaraan sebuah aktivitas dilingkungan yang beorientasi terhadap kehidupan sosial dalam kehidupan individu maupun kelompok yang berfokus pada sebuah partisipasi publik pada sektor politik ekonomi dan kepemimpinan. Tulisan ini berfokus pada kondisi atau fenomena gender di Kota Tanjungpinang yang menunjukkan angka tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau ditengah pandemi COVID-19 tahun 2020. Adapun metode yang dilakukan peneliti berupa kajian kepustakaan secara kualitatif dengan menggunakan data sekunder yaitu pemberitaan, laporan, dokumen yang dianalisis secara mendalam menggunakan model logika dan model pengembangan penjelasan sesuai dengan studi kasus yang ada. Hasil menunjukkan bahwa pemberdayaan gender berpengaruh pada dimensi keterwakilan parlemen, pengambilan keputusan, serta distribusi pendapatan sangat mempengaruhi pada kondisi sistem pemerintahan Kota Tanjungpinang. Artinya pemberdayaan gender mempunyai kesadaran tingkat individual secara masif yang menginginkan keterlibatan secara berkelanjutan. Kemudian pemberdayaan gender tersebut didukung para pemangku kepemimpinan dalam kemampuan mendorong pemberdayaan gender pada generasi ke generasi Kota Tanjungpinang di tengah pandemi COVID-19.

Kata kunci: Perspektif Analisis; Pemberdayaan Gender; COVID-19

Abstract

Gender empowerment is an innovation in a social life-oriented setting that focuses on public engagement in the political, economic, and leadership spheres. This article focuses on the condition or gender phenomena in Tanjungpinang City, which has the greatest number of COVID-19 cases in the Riau Islands Province in 2020. The researcher's technique is a qualitative literature study based on secondary sources, including news, reports, and documents that are subjectively assessed using a logical model and a model for explanation building based on current case studies. The findings indicate that female empowerment has an effect on parliamentary representation, decision-making, and income distribution, all of which have a significant impact on the state of the Tanjungpinang City government system. This indicates that gender empowerment requires a high degree of individual knowledge and ongoing participation. Then, relevant stakeholders are encouraged to assist women empowerment in Tanjungpinang City generations during the COVID-19 pandemic.

Keywords: Analysis Perspectives; Gender Empowerment; COVID-19

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

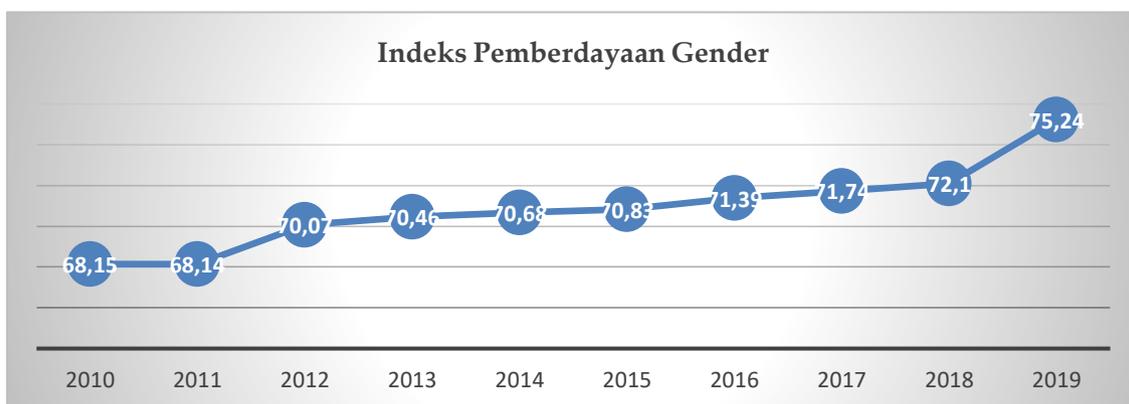
Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



PENDAHULUAN

Kesetaraan gender di Indonesia sangat berdampak langsung pada pengembangan pembangunan manusia, kesenjangan gender pun semakin terlihat dalam kondisi pada masa pandemi COVID-19 (Arivia, 2020). Perempuan merupakan salah satu diantaranya baik secara individu maupun kelompok yang akan kritis dari perlindungan. Hal ini dapat dibuktikan sampai saat ini menjadi tantangan besar pada beberapa sektor terutama beban mereka seperti tenaga pendidik (Haekal & Fitri, 2020), mencari pendapatan diri sendiri (Adnan & Amri, 2020; Dewi, 2012),

kebutuhan rumah tangga (Dahlia, 2018; Hamid et al., 2020) serta berbagai upaya ancaman yang masih dianggap makhluk yang lemah secara umum mengakibatkan kekerasan dalam kehidupannya sendiri (Winahyu, 2020). Pada hakekatnya, kesetaraan gender bagian dari hak asasi manusia yang layak dihormati serta bebas dari rasa ancaman untuk menentukan pilihan hidupnya yang tidak hanya sepenuhnya diperuntukkan bagi para laki-laki (Wageindikator, 2013; Wahyuni & Solina, 2021).



Gambar 1. Indeks Pemberdayaan Gender di Indonesia Periode 2010-2019 (Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2020).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) RI pada tahun 2020 menunjukkan indeks terhadap pemberdayaan gender terus meningkat pada setiap tahunnya dalam 10 tahun terakhir dari tahun 2010 hingga 2019, selanjutnya terjadi lonjakan angka dari tahun 2018 ke 2019 diakibatkan banyak perempuan yang menjadi garda terdepan dalam kondisi pandemi COVID-19. Hal ini dibuktikan pada penganugerahan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020. APE merupakan penghargaan atas prakarsa dan prestasi yang dicapai dengan menunjukkan kondisi dan kesejahteraan dalam kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan gender.

Pada umumnya, dalam kehidupan sehari-hari banyaknya terjadi keadaan perempuan dianggap hanya sebagai sosok pelengkap serta dianggap lemah, terlebih lagi adanya pola berpikir pada umumnya bahwa kapasitas perempuan hanya sebatas mengurus rumah tangga saja sehingga pada akhirnya membuat perempuan itu tidak menjadi prioritas utama. Dalam masa pandemi COVID-19, kesetaraan gender sangat mengkhawatirkan dikarenakan munculnya rasa ketakutan dibandingkan laki-laki sehingga produktifitas dilingkungan sekitar yang berdampak negatif (Fisher & Ryan, 2021; Paramita et al., 2021; Perez et al., 2020; Wijaya et al., 2020), sehingga banyak perempuan memiliki kecenderungan

lebih banyak mematuhi protokol kesehatan ketika gender dikategorikan sebagai jenis kelamin yang dikotomis.

Hal ini disebabkan orientasi pada psikologi gender yang baik pada kondisi kehidupan yang tidak normal masa pandemi COVID-19 (Collins et al., 2021; Hupkau & Petrongolo, 2020; Paramita et al., 2021). Selain itu tingkat kesenjangan gender yang

tinggi sehingga terus meningkat 20-50% tuntutan beban terhadap akan pekerjaan rumah (melayani suami dan anak) didalam keluarga yang harus bekerja dari rumah memiliki tanggung jawab melebihi kapasitas jam tanggungjawabnya sebagai istri (Collins et al., 2021).

Tabel 1. Komponen pada Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Dimensi	Indikator	Indeks Dimensi
Keterwakilan di Parlemen	Proporsi keterwakilan di parlemen laki-laki dan perempuan	Indeks keterwakilan perempuan
Pengambilan Keputusan	Proporsi struktural diantaranya manajer, staf administrasi, pekerja profesional, teknisi pada laki-laki dan perempuan	Indeks pengambilan keputusan
Distribusi Pendapatan	Upah buruh pada non pertanian pada laki-laki dan perempuan	Indeks pendapatan

Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2020

Indikator pada indeks pemberdayaan gender bisa dilihat dari 3 dimensi utama diantaranya ada keterwakilan parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan. Keterwakilan parlemen dikategorikan sebagai sebuah arena politik dimana proses kebijakan yang dibuat berfokus pada gerakan perempuan di dunia, selain menuntut hak dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan juga mendorong partisipasi keterwakilan perempuan dalam mengambil peran baik didalam partai politik di Indonesia untuk melakukan aktivitas gatekeeping terutama dalam kandidasi perempuan seperti menjadi Dewan Perwakilan Rakyat baik di tingkat daerah maupun nasional (Adeni & Harahap, 2017; Mukarom, 2008; Rodiyah, 2013; Zaetun & Maryah, 2020). Terlebih kondisi pada gelombang modernisasi yang kian menerima seakan sangat mudah menenggelamkan orang-orang yang tidak siap dengan perkembangan zaman, mau tidak mau perempuan harus mengikutinya (Aspariyana, 2018).

Kemudian dalam pengambilan keputusan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang

mempunyai strategi dalam peningkatan serta pengembangan dari berbagai sektor, baik dari sektor ekonomi, budaya, sosial dan sebagainya, hal ini diperuntukan untuk kaum gender di Indonesia agar keadilan dari berbagai aspek tersebut bisa dirasakan secara signifikan (Azizah, 2019; Rinawati et al., 2007; Sahban, 2016; Tuapattinaya & Hartati, 2014; Solina et al., 2021). Distribusi pendapatan akan berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD), partisipasi perempuan didalam dunia pekerjaan baik sektor formal dan informal mendorong pengurangan tingkan pengangguran hingga kemiskinan (Adnan & Amri, 2020; Amnesi, 2013), terutama perempuan yang memiliki softskill dan hardskill yang memberikan kontribusi terhadap industri usaha mikro, kecil, dan menengah atau disebut UMKM (Angin & Sukamto, 2014; Hamid et al., 2020; Sri, 2013; Syarif & Zainuddin, 2017).

Namun demikian dari 3 dimensi yang telah dijelaskan, pemberdayaan gender juga harus mengidentifikasi dari strategi dan kebijakan pembangunan berbagai bidang-bidang yang lain seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi tersebut harus didukung oleh peran serta dari seluruh

lapisan masyarakat dengan mengutamakan kesetaraan gender. Mengingat sampai saat ini masih dijumpai kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan maka diperlukan program-program untuk mendukung pembangunan kualitas perempuan agar dapat menjadi lebih mandiri, tangguh, dan berdaya saing. Meskipun demikian identifikasi kesetaraan gender mendapat sebuah kerumitan dalam kondisi pandemi COVID-19, berbeda di Kota Tanjungpinang memiliki fenomena yang tidak biasa terhadap kesetaraan gender.

Sebagai salah satu strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Riau menunjukkan angka Indeks pemberdayaan gender (IDG) di Tanjungpinang tahun 2020 tertinggi di antara kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau yaitu 76,13%. Sedangkan Wilayah pada peringkat kedua Kota Batam 58,40%, disusul dengan Kabupaten Kepulauan Anambas 57,74% dan Kabupaten Bintan 69,71% serta Kabupaten Lingga 48,96%, Kabupaten Karimun 64,17% hingga Kabupaten Natuna 42,02%. Padahal populasi Kota Tanjungpinang berjumlah 227,663 jiwa dengan besar wilayah 150,86 km². Hal ini membuat pemerintah kota Tanjungpinang mengajukan Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

APE merupakan sebagai bentuk penghargaan atas prakarsa dan prestasi yang dicapai dengan menunjukkan kondisi dan kesejahteraan orang lain dalam kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan gender di beberapa daerah yang memiliki perkembangan dan kemajuan dengan konsep modernisasi. Prestasi ini menunjukkan keberhasilan para pemangku kepentingan sebagai upaya menciptakan keadilan secara berkelanjutan. Maka berdasarkan penjelasan dan uraian diatas maka penting bagi peneliti untuk menganalisis apa yang menyebabkan angka

indeks pemberdayaan gender tertinggi di Kota Tanjungpinang tahun 2020.

Pada penelitian sebelumnya, Penelitian tentang gender di Kota Tanjungpinang lebih difokuskan pada Evaluasi Formatif pada Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya ada penelitian yang membahas tentang analisis antar organisasi dalam implementasi pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan di kota Tanjungpinang. Maka peneliti memfokuskan pada perspektif analisis indeks pemberdayaan gender Kota Tanjungpinang pada masa pandemi Covid-19.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis pemberdayaan gender yaitu kualitatif berupa deskriptif, Penelitian kualitatif berfokus pada kualitas yang bersifat induktif dalam mengambil kesimpulan berdasarkan data primer maupun data sekunder diperoleh untuk menjawab fenomena (McCusker & Gunaydin, 2015). Teknik pengumpulan data dimana sumber data yang peneliti peroleh berdasarkan data sekunder kepustakaan, data sekunder yang berhubungan dengan gender (Galvan & Galvan, 2017; Zed, 2014), Secara teknis, peneliti menggunakan sumber data dari webiste terkait pemberitaan gender di Kota Tanjungpinang serta sumber data yang lainnya yang di anggap relevan oleh peneliti.

Selanjutnya teknik analisis data menggunakan model mengembangkan penjelasan dan model logika , model logika lebih melihat pada kekuatan pada setiap data yang disajikan sesuai temuan peneliti dengan menggunakan data sekunder yang diuraikan berupa kata-kata sehingga membentuk kalimat hingga paragraf secara terstruktur yang merupakan bagian dari strategi dengan menggunakan studi kasus (Yin, 2015). Dimensi analisis data terkait dengan gender terdiri dari tiga klasifikasi diantaranya keterwakilan parlemen

perempuan yang berdampak pada lingkungan sosial, selanjutnya dimensi dalam pengambilan keputusan secara formal maupun informal pada keterlibatan perempuan yang berpengaruh terhadap kesejahteraan gender dan yang terakhir dimensi distribusi pendapatan.

Distribusi pendapatan perempuan akan menjadi tolak ukur berpengaruhnya dari sisi perekonomian yang ada. Dari ketiga dimensi pemberdayaan gender Kota Tanjungpinang akan menghasilkan sebuah kajian yang memiliki makna tersendiri di karenakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang menunjukkan angka yang tinggi Indeks pemberdayaan perempuan di Kepulauan Riau Tahun 2020. Hasil dari analisis tersebut pastinya akan mempengaruhi dari tiga dimensi dalam pengukuran bersifat kualitatif dalam peningkatan angka indeks pemberdayaan perempuan di Kota Tanjungpinang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Pemberdayaan Gender di Indonesia

Representasi perempuan dan partisipasi yang setara dalam politik sangat penting untuk memastikan bahwa perempuan dapat secara bebas menggunakan hak-hak mereka dan memenuhi potensi mereka tanpa terkendali. Representasi dan partisipasi ini harus ditingkatkan dengan mempromosikan perempuan untuk mengambil peran sentral dalam proses pengambilan keputusan strategis. Peran ini lazim dalam memastikan bahwa keputusan tersebut mencerminkan kepentingan terbaik perempuan.

Kombinasi kerangka hukum dan kebijakan di Indonesia menghasilkan tren peningkatan perempuan yang terpilih dalam pemilihan legislatif. Khususnya, dalam Pemilu 2019, dari 575 anggota parlemen yang terpilih, 118 di antaranya adalah perempuan. gara dengan budaya patriarki yang meresap, tren yang meningkat ini

merupakan pencapaian yang menjadi motivasi bagi perempuan politik dan bertujuan untuk persentase yang lebih tinggi di masa depan.

Di sektor bisnis, karena Indonesia adalah rumah bagi lima startup unicorn, 31 persen perempuan memperoleh posisi manajerial di perusahaan startup Indonesia. Ini adalah prestasi yang membantu menghancurkan stereotip gender perempuan yang persisten di bidang STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics); semakin meningkatnya Kehadiran perempuan di STEM, khususnya sektor IT, membantu membuka jalan menuju integrasi kebijakan-data gender dalam jangka panjang. Terkait perlindungan hak-hak perempuan di tempat kerja, pihaknya juga berpendapat pentingnya menjaga kesehatan dan meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja bagi perempuan yang bekerja dengan memberikan cuti hamil, ruang laktasi, dan pusat penitipan anak dan jam kerja yang fleksibel bagi perempuan hamil.

Pemerintahan di Indonesia akan terus mempromosikan kepemimpinan dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan mengakui peran penting kontribusi perempuan dalam menciptakan peluang ekonomi dan memberdayakan masyarakat lokal. Untuk mewujudkan ketertinggalan dan pencapaian target tersebut, pemerintah sedang giatnya merefleksikan agenda pembangunan global yang menekankan pentingnya kesetaraan gender. Yaitu dengan memberi kesempatan yang sama untuk kepemimpinan perempuan di setiap tingkat pengambilan keputusan, khususnya di bidang politik pada tingkat daerah maupun nasional.

Parpol sangat berpengaruh dan diharapkan memberi ruang bagi penguatan kebijakan dan strategi afirmasi dengan menempatkan perempuan pada posisi tertinggi di masing-masing partai. Sesungguhnya upaya meningkatkan keterwakilan perempuan tidak mudah. Perlu sinergitas serta komitmen yang kuat dari

pemerintah, parpol, maupun dari perempuan itu sendiri agar mau terus berusaha menjadi perempuan berdaya saing. Perlu ada ruang hukum yang seluas-luasnya agar tercipta kesempatan yang sama. Mendobrak budaya patriaki adalah tugas kita semua, bukan hanya tugas perempuan.

Posisi Parlemen Perempuan Kota Tanjungpinang

Kondisi parlemen perempuan setiap tahunnya meningkat dengan banyaknya kampanye terhadap suara-suara kelompok maupun individu diberbagai kalangan. Kebijakan didalam parlemen sangat penting jika perempuan terlibat dalam beberapa usulan serta perencanaan untuk memperjuangkan hak dan keadilan perempuan, baik dalam hal yang positif dan negatif. Sebab seringkali anggota laki-laki didalam parlemen tidak dapat sepenuhnya mewakili kepentingan perempuan karena adanya perbedaan pengalaman dan kepentingan antara keduanya. Seperti contoh adanya beda pendapat dengan anggota legislatif yang umumnya laki-laki dimana ide-ide maupun usulan-usulan

mereka itu tidak didengarkan, disepelekan bahkan dianggap kurang bermanfaat.

Beberapa partai politik di Kota Tanjungpinang mempunyai strategi untuk meningkatkan suaranya dalam keterwakilan perempuan karena pada dasarnya partai politik mempunyai kaderisasi yang cukup baik dalam rekrutmen anggota partai sehingga posisi parlemen untuk perempuan bisa dimiliki, sehingga tidak dapat dimaknai keterwakilan mereka hanya untuk daya tarik mobilisasi masa perempuan demi kemenangan partai. Posisi parlemen Kota Tanjungpinang saat ini berjumlah 30 diantaranya 21 laki-laki dan 9 perempuan, artinya keterwakilan perempuan diparlemen mencapai 27% dari total keseluruhan anggota DPRD Kota Tanjungpinang. Meskipun tidak mencapai 30% keterwakilan perempuan yang berdasarkan tingkat nasional sesuai dengan UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam partai politik sangat mempengaruhi perannya dimasyarakat.

Tabel 2. Anggota Parlemen Perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang

Nama	Partai Politik
Hj. Yuniarni Pustoko Weni, S.H.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
Sri Artha Sihombing	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
Reni, SE	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
Rini Pratiwi, S.Pd., M.M.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Hj. Rosiani	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Hj. Mimi Betty Wilingsih, S.IP.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)
Ria Ukur Rindu Tondang	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
Rika Adrian, S.H.	Partai Amanat Nasional (PAN)
Rina Febriani, S.E .	Partai Demokrat

Sumber: Tanjungpinang.go.id (dalam Haryanto, 2019)

Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Sebuah pilihan yang telah menjadi keyakinan agar tercapainya pada tujuan akan menghasilkan pada tindakan disebut pengambilan keputusan. Pemimpin sebuah kelompok ataupun individu bagian dari

kekuasaan dalam pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan ataupun ketidakpastian yang harus dilakukan dengan tepat sasaran. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan sebagai upaya pembuktian dimana mereka dipilih berdasarkan kekuatan yang dipercayai

untuk mengendalikan beberapa keputusan yang berdampak pada lingkungan masyarakat. Hal ini sangat menjadi penilaian publik bahwasanya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan bisa memperlihatkan kekuatan kesetaraan gender.

Keterlibatan perempuan di Kota Tanjungpinang bisa dilihat dari aktor kepentingan yang memiliki jabatan strategis, jabatan yang dimaksud untuk menunjukkan eksistensi serta kompetensi secara

profesional bahwasanya perempuan mampu mengendalikan sistem pemerintahan yang berorientasi otonomi daerah. Pengambilan keputusan dalam keterlibatan perempuan pada sosok pemimpin akan menjadi perspektif keadilan yang baru, adil dalam arti semua dimata manusia akan sama, sama hak dan memiliki sebagai makhluk sosial, sehingga kesenjangan gender bisa diminimalisir sebaik mungkin. Adapun keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pada tabel dibawah ini;

Tabel 3. Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Jabatan	Nama
Walikota Kota Tanjungpinang	Hj. Rahma, S.IP.
Ketua DPRD Kota Tanjungpinang	Hj. Yuniarni Pustoko Weni, S.H.
Kepala Kejaksaan Tinggi (KAJAR) Kota Tanjungpinang	Ahelya Abustam, S.H., M.H.
Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Tanjungpinang	Juwariah Syahrul

Sumber: Data Sekunder, 2020

Pendapatan Sektor Informal Perempuan Kota Tanjungpinang

Sektor informal merupakan pelaku usaha berskala kecil yang mendistribusikan serta memproduksi berupa jasa dan barang dengan mempunyai tujuan untuk menciptakan kesempatan dalam bekerja serta memperoleh pendapatan dalam membantu perekonomiannya untuk mendorong pendapatannya. Pada sektor ini biasanya terjadi secara berkala karena percepatan kebutuhan kerja yang besar serta

penyerapan sektor formal dikategorikan ketidakkampuannya pada taraf kehidupan sosial. Pendapatan sektor informal pada perempuan atau kaum gender biasanya menunjukkan sebesar 55 persen wanita bekerja itu ada di sektor informal dan Usaha Kecil Mikro (UKM) dibandingkan bekerja di sektor formal, sebabnya persepsi pekerjaan formal itu masih dianggap bahwasanya pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh laki-laki dan tidak cocok bagi perempuan.

Tabel 4. Angkatan Kerja Penduduk Kota Tanjungpinang Tahun 2019

Status	L	P	Rata-Rata
Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	93,73 %	95,44%	94,36%
Tingkat Pengangguran	6,27 %	4,56%	5,64%

Sumber: Statistik Ketenagakerjaan Kota Tanjungpinang, 2019

Angka pada Angkatan Kerja Penduduk Kota Tanjungpinang Tahun 2019 bahwasanya kondisi antara pekerja laki-laki dan perempuan mempunyai angka yang signifikan, artinya kebutuhan perempuan pada perspektif gender pada lapangan pekerjaan sangat menjadi tolak ukur tingginya indeks pemberdayaan gender di

Kota Tanjungpinang. Selain itu pekerjaan sektor informal yang pastinya akan berdampak pada pendapatan daerah yang kini menjadi pendorong kesejahteraan perempuan, disisi pendapatan sektor informal perempuan untuk daerah Kota Tanjungpinang sebesar 26 % berdasarkan data BPS Tahun 2019, artinya angka

tersebut keterlibatan perempuan pada pendapatan sektor informal masih ada dan mampu mendorong pendapatan sektor informal untuk kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungpinang bagi kaum gender.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya indeks pemberdayaan perempuan pada dimensi keterwakilan parlemen dalam perpolitikan di Kota Tanjungpinang sangat mempengaruhi masyarakat dalam memilih keterwakilannya untuk dapat memperjuangi apresiasi-apresiasi baik terhadap permasalahan kesetaraan gender maupun inovasi pada kesetaraan gender. Dengan adanya posisi parlemen keterwakilan perempuan dapat menjadi kaderisasi sebagai penerus terhadap generasi ke generasi secara berkelanjutan. Jika kekuatan kaderisasi partai politik berdampak pada kaum perempuan, bisa diprediksi akan meningkat pada pemilihan legislatif untuk mendapatkan posisi keterwakilan perempuan di parlemen Kota Tanjungpinang.

Namun sebaliknya jika kondisi dalam pandemi COVID-19 keterwakilan parlemen perempuan tidak bisa mempertahankan performanya didalam memperjuangkan hak dan keadilan gender, maka pelemahan gender pada masyarakat Kota Tanjungpinang akan tinggi disebabkan tidak adanya kontrol diparlemen. Keterwakilan parlemen di Kota Tanjungpinang harus bekerja keras untuk mencari alternatif maupun isu-isu terkini agar perannya di parlemen bisa difungsikan sebaik mungkin tanpa adanya tekanan dan intimidasi dari pihak manapun. Artinya pentingnya peningkatan kualitas terhadap kuantitas pada wawasan parlemen perempuan sebagai anggota DPRD Kota Tanjungpinang.

Posisi startegis pada aktor pemangku kepentingan pada keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan memiliki kekuasaan yang sangat besar untuk memberikan rasa keadilan dari setiap aspek atas wewenang yang mereka miliki, terlebih kekuasaan pada dasarnya melekat pada diri

setiap individu para pemimpin yang merasakan kondisi permasalahan dihadapi pada kesetaraan gender Kota Tanjungpinang. Artinya peran yang mereka miliki bisa mengurangi kesenjangan gender.

Seperti contoh Ketua DPRD Kota Tanjungpinang memiliki peran mengatur serta merencanakan konsep kesetaraan gender yang modernisasi pada aturan dan regulasinya, peran Walikota Tanjungpinang dalam penerapan atau implementasi berdasarkan aturan tersebut yang berpedoman pada rencana startegis (RENSTRA) jangka pendek dan jangka panjang.

Selanjutnya jika tahapan kedua tersebut ada kondisi dimana memiliki permasalahan baik didalam perencanaan serta pengimplemntasian selanjutnya maka pengawasan yang tertinggi adalah melalui pengadilan atau kejaksaan tinggi yang berkejasama dengan instansi vertikal lainnya agar bisa memberikan sebuah sanksi yang berkeadilan pada kesetaraan gender di Kota Tanjungpinang, kemudian yang terakhir pembinaan kesejahteraan keluarga sebagai faktor utama yang harus ada didalam kehidupan masyarakat pentingnya peran gender dalam lingkungannya sendiri, sebab pembinaan kesejahteraan ini adalah ukuran keberhasilan gender jika sudah melalui pengambilan keputusan sebelumnya (Ketua DPRD, Walikota dan Kejati) maka bisa dipastikan akan mendapatkan jaminan meningkatnya kualitas gender di Kota Tanjungpinang.

Peran pemeritah maupun swasta untuk upaya peningkatan pendapatan sektor informal perempuan di Kota Tanjungpinang harus dilakukan berupa inovasi keterbukaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan faktor usia dan faktor kemampuan yang tepat sasaran, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan angka pengangguran dimasa depan jika instrumen pada dimensi kesetaraan gender pada sektor formal tidak diperhatikan, upaya-upaya pemberdayaan gender harus

mengutamakan pada prinsip keadilan serta memordenisasi lingkungan perempuan sebagai bentuk kontribusi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan perempuan dalam mengurangi kesenjangan gender.

SIMPULAN DAN SARAN

Dimensi pada indeks pemberdayaan gender di Kota Tanjungpinang yang tinggi pada tahun 2019 dalam masa pandemi COVID-19 sudah menunjukkan kualitas dan kuantitas yang baik dalam mengatasi kesenjangan gender. Namun perlu diperhatikan bahwasanya tingginya angka indeks pemberdayaan gender tidak menjamin pada keberhasilan gender kaum perempuan mendapatkan hak kesamaan dalam kehidupan sosial, karena dalam masa pandemi COVID-19 ini memungkinkan banyaknya kejadian yang terjadi baik yang bersifat positif maupun negatif secara cepat. Pertama keterwakilan perempuan diparlemen harus ada perumusan kebijakan bagi gender dalam kondisi kedaruratan agar lebih berperan aktif untuk memberikan sebuah pemikiran pada studi pemberdayaan gender di Kota Tanjungpinang.

Kemudian yang Kedua keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan harus mempunyai keputusan yang ideal agar penerapan pemberdayaan gender bisa diterima masyarakat Kota Tanjungpinang. Selanjutnya pada pendapatan perempuan disektor informal harus melihat kebutuhan dan ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga pendapatan perempuan memberikan dampak yang cukup besar untuk pendapatan daerah, selain pendapatan daerah individu pendapatan perempuan sektor informal tersebut menekan tingkat krisis dalam berkehidupan khususnya bagi didalam keluarganya.

Saran dari peneliti perlu juga diperhatikan analisis pada tinggi indeks pemberdayaan gender Kota Tanjungpinang harus memperhatikan fenomena dampak sosial untuk mengukur keabsahan analisis pada indeks pemberdayaan gender Kota

Tanjungpinang berdasarkan fakta dan data sekunder yang peneliti peroleh, bagi peneliti selanjutnya perlu adanya konsep analisis pada manajemen startegis pada dimensi dan indikator pemberdayaan gender di Kota Tanjungpinang pada tahun berikutnya dalam masa pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeni, S., & Harahap, M. A. (2017). Komunikasi politik dan keterwakilan perempuan dalam arena politik. *Jurnal Pespektif Komunikasi*, 1(2), 1–7.
- Adnan, G., & Amri, K. (2020). Apakah pendapatan perempuan dapat mengurangi kemiskinan? Bukti data panel di Indonesia. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 8(1), 64–71.
- Amnesi, D. (2013). Analisis faktor-faktor berpengaruh terhadap pendapatan perempuan pada keluarga miskin di Kelurahan kapal Kecamatan Mengwi kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 1(1), 1–21.
- Angin, N. B. P., & Sukamto, A. (2014). Kontribusi pekerja perempuan terhadap pembentukan pendapatan keluarga; Studi kasis pekerja perempuan industri kerajinan gerabah di Pendukuhan Kajen, Desa Bangun Jiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, DIY tahun 2014. *Jurnal Ekonomi Terapan*, 5(2), 1–14.
- Arivia, G. (2020). Perspektif Feminisme: Interseksionalitas dan COVID-19. *Jurnal Perempuan*, 25(4), 221–231.
- Aspariyana, A. (2018). *Dampak Modernisasi Perilaku terhadap Budaya*. Teraju Umrah. <https://teraju.umrah.ac.id/dampak-moderenisasi-perilaku-terhadap-budaya/>
- Azizah, R. N. (2019). Analisis pengambilan keputusan perempuan Pesisir menjadi buruh migran di Desa Prapag Lor. *EMPOWER: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2), 241–258.

- <http://syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/empower>
- Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, Indeks Pemberdayaan Perempuan Tahun 2017-2019
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2019
- Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang Tahun 2019
- Collins, C., Landivar, L. C., Ruppner, L., & Scarborough, W. J. (2021). COVID-19 and the gender gap in work hours. *Gender, Work and Organization*, 28(S1), 101–112. <https://doi.org/10.1111/gwao.12506>
- Dahlia, D. (2018). Kontribusi pendapatan perempuan terhadap rumah tangga (Studi Pasar Sentral Majane Sulawesi Barat). *An-Nisa'*, 11(2), 458–466.
- Dewi, P. M. (2012). Partisipasi tenaga kerja perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 5(2), 119–124.
- Fisher, A. N., & Ryan, M. K. (2021). Gender inequalities during COVID-19. *Group Processes and Intergroup Relations*, 24(2), 237–245. <https://doi.org/10.1177/1368430220984248>
- Galvan, J. L., & Galvan, M. C. (2017). *Writing literatur reviews: A guide for student of the social and behavior sciences* (7th ed.). Routledge.
- Haekal, M., & Fitri, A. (2020). Dilema Peran Ganda Dosen Perempuan Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia. *JAS-PT (Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia)*, 4(2), 171–182. <https://doi.org/10.36339/jaspt.v4i2.366>
- Hamid, A. W. S., Sumarti, T., & Indriana, H. (2020). Partisipasi perempuan dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat dengan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(2), 235–248. <https://doi.org/10.29244/jskpm.4.2.235-248>
- Haryanto, Y. (2019). *30 Anggota DPRD Kota Tanjungpinang 2019-2024, Resmi Dilantik*. Tanjungpinangkota.Go.Id. <https://www.tanjungpinangkota.go.id/bberita/30-anggota-dprd-kota-tanjungpinang-20192024-resmi-dilantik#prettyPhoto>
- Hupkau, C., & Petrongolo, B. (2020). Work, Care and Gender during the COVID-19 Crisis*. *Fiscal Studies*, 41(3), 623–651. <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12245>
- Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Inpres PUG)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020
- McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015). Research using qualitative, quantitative or mixed methods and choice based on the research. *Perfusion (United Kingdom)*, 30(7), 537–542. <https://doi.org/10.1177/0267659114559116>
- Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan politik; Studi komunikasi politik tentang keterwakilan perempuan di Legislatif. *MediaTor: Jurnal Komunikasi*, 9(2), 257–270.
- Paramita, W., Rostiani, R., Winahjoe, S., Wibowo, A., Virgosita, R., & Audita, H. (2021). Explaining the Voluntary Compliance to COVID-19 Measures: An Extrapolation on the Gender Perspective. *Global Journal of Flexible Systems Management*. <https://doi.org/10.1007/s40171-021-00261-1>
- Perez, Y. B., Fleites, Z. F., Puig, El. J., Castillo, E. F., & Martin, B. R. (2020). Gender and Fear of COVID-19 in a Cuban Population Sample. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 1–9. <https://doi.org/10.1007/s11469-020-00343-8>
- Rinawati, R., Fardiah, D., & Kurniadi, O. (2007). Keterlibatan perempuan dalam

- pengambilan keputusan pada perencanaan pembangunan. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 23(2), 157–177.
- Rodiyah, I. (2013). Keterwakilan perempuan dalam dewan perwakilan rakyat daerah. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 1(1), 55–70.
- Safitri, D. P., & Edison, E. (2020). Evaluasi Formatif: Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 6(2), 593-612.
- Sahban, H. (2016). Peran kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan di Indonesia. *Jurnal Imiah BONGAYA (Manajemen & Akuntansi)*, 19(1), 57–72.
- Solina, E., Aspariyana, A., & Mahadiansar, M. (2021). Dampak sosial ekonomi masyarakat penerima bantuan langsung tunai masa Pandemi COVID-19 di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Neo Societal*, 6(2), 135-143. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/NeoSocietal/article/view/17154>
- Sri, A. P. A. (2013). Faktor-faktor yang memotivasi perempuan sebagai pengelola pondok wisata di kelurahan ubud kecamatan ubud kabupaten Gianyar. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 1, 1–10.
- Syarif, A., & Zainuddin, M. (2017). Kontribusi ekonomi dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan pada usahatani sayuran di Kabupaten Bantaeng. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian (SNP2M)*, 8–12. http://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/sn_p2m/article/download/474/402
- Tuapattinaya, Y. I. F., & Hartati, S. (2014). Pengambilan keputusan untuk menikah beda etnis: Studi fenomenologis pada perempuan Jawa. *Jurnal Psikologi Undip*, 13(1), 34–41.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat
- Wahyuni, S., & Solina, E. (2021). Overcoming poverty in Laut Tribe households through gender relations on Lipan Island, Riau Islands Province. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 16(1), 34-42.
- Wageindikator, W. (2013). *Perempuan: Kesetaraan Gender di Indonesia*. Gajimu.Com. <https://gajimu.com/tips-karir/Tentang-wanita/perempuan-dan-teriakannya-seputar-kesetaraan-gender>
- Wijaya, T. T., Ying, Z., & Suan, L. (2020). Gender and Self Regulated Learning During COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Jurnal Basicedu*, 4(3), 725–732. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i3.422>
- Winahyu, A. I. (2020). *Kesetaraan gender di Indonesia masih rendah*. MediaIndonesia. <https://mediaindonesia.com/humaniora/351154/kesetaraan-gender-di-indonesia-masih-rendah>
- Yin, R. K. (2015). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). Sage Publication.
- Zaetun, S., & Maryah, C. (2020). Politik Kekerabatan dalam keterwakilan perempuan pada rekrutmen politik partai nasdem pada pemilu 2019. *The Journalish: Social and Government*, 1(3), 119–129.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan* (3rd ed.). Yayasan Obor Indonesia.